

PEREMPUAN, KEKUASAAN, DAN KORUPSI

Ahmad Imron Rozuli*

Abstract

This article discusses the involvement of women in corrupt behavior. Corruption can occur when women become part of authority. When women are in power, what happens is to become part of corruption. In other words, whoever is in power there is room for corruption. This is what women are practicing in the grass of power. Women lose their idealism while in power. The temptation of corruption of power through corruption is present in the public sphere. It is therefore not wrong to say that women and men are the same when in power. The implication is that women's charms as holy beings of corrupt behavior are crumbling.

Keywords: women, power and corruption.

Abstrak

Artikel ini membahas keterlibatan kaum perempuan dalam perilaku korupsi. Korupsi bisa terjadi ketika kaum perempuan menjadi bagian dari kekuasaan. Ketika perempuan berada dalam kekuasaan, maka yang terjadi adalah ikut menjadi bagian dari korupsi. Dengan kata lain, siapa pun yang berkuasa ada ruang untuk melakukan korupsi. Hal inilah yang sedang dipraktikkan oleh kaum perempuan dalam panggung kekuasaan. Perempuan kehilangan idealisme ketika sedang berkuasa. Godaan penyelewengan kekuasaan melalui tindak pidana korupsi hadir di ruang publik. Karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama saja ketika sedang berkuasa. Implikasinya adalah pesona perempuan sebagai makhluk suci dari perilaku korupsi menjadi runtuh.

Kata kunci: perempuan ,kekuasaan dan korupsi.

* Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

PENGANTAR

*Entah apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Korupsi terjadi dan terjadi lagi.
Ditangkap dan ditangkap lagi.
Sampai kapan akan terus terjadi?
Kompas, 1 Juli 2016*

Kehidupan modern memberikan banyak kesempatan sekaligus tantangan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik. Dikatakan kesempatan karena demokratisasi yang sedang dijalankan telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dan menduduki jabatan publik alias berkuasa. Semua jabatan politik di negara-negara modern dan demokratis mengakomodir kehadiran perempuan. Sedangkan tantangannya ada dua menurut Rahayu [2012;59]. *Pertama*, dalam dunia politik masa kini masih terasa dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan. *Kedua*, meskipun terjadi dominasi, tidak sedikit kaum perempuan yang berhasil menjadi pemimpin politik.

Kehadiran perempuan dalam dunia politik, sekaligus menjadi pemimpin tentu perlu diwaspadai. Maklum, jabatan dan kekuasaan seringkali membutuhkan tidak hanya mata, tetapi bahkan hatinya. Kekuasaan itu memabukkan; membuat orang lupa segala-galanya; lupa asal-usulnya. Pemimpin hanya memikirkan bagaimana mengakumulasi kekuasaan agar tambah besar [Kompas, 21 Januari 2018]. Ketika kekuasaan begitu besar, maka terbuka peluang untuk menyalahgunakannya. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pemimpin ataupun politisi perempuan melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Keterlibatan perempuan dalam praktik korupsi politik berimplikasi negatif. Bahkan, timbul ungkapan bahwa perempuan dan laki-laki sama saja. Mereka melakukan praktik korupsi ketika sedang berkuasa.

PEREMPUAN DAN KEKUASAAN

Perempuan dan kekuasaan merupakan produk politik purba yang sudah lama terjadi. Sejarah kehadiran perempuan dalam politik sudah terjadi. Bahkan, kedudukan perempuan dalam sejarah lokal telah membentuk peradaban kita masa kini [Reid,2011;xiii]. Dalam cerita Mahabharata ditampilkan kisah tentang perempuan-perempuan tangguh yang berpengaruh dalam patriarki. Mereka adalah perempuan yang

cerdas, terampil, terpelajar, menguasai urusan kenegaraan, dan jika diperlukan diperlukan bisa berbalik membangkang, licik, dan kejam. Para lelaki justru peragu. Perempuan yang memiliki karakter paling tegas antara lain Kunti, Drupadi, dan Satyawati [Sharma, 2013;1].

Di Tanah Jawa, Aan Kumar [2008] pernah menceritakan prajurit perempuan dalam istana. Di Aceh maupun di Jawa perempuan menjadi prajurit tangguh. Keikutsertaan kaum perempuan bangsawan dalam seluruh tindakan politik memiliki implikasi pada kehidupan ekonomi. Tidak hanya itu, peran perempuan juga dilukiskan dalam pertarungan kekuasaan yang tidak bergeser dari pola sejarah yang ada, sekaligus juga perjalanan membangun pengetahuan. Lebih jauh lagi, perempuan memiliki peran dan hak terhadap kekuasaan [Permanadeli,2018].

Keterlibatan perempuan dalam kekuasaan merupakan produk dari sejarah. Karena itu, dengan menjadi pejabat publik, maka perempuan bisa meningkatkan gengsi sosial dan politiknya [Swantoro, 2007;378]. Untuk menjaga agar tetap berkuasa diperlukan taktik dan strategi dalam merawat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan harus direbut bagaimana pun caranya dan kemudian mempertahankannya [*Kompas*, 21 Januari 2018]. Sejarah telah mencatat penguasa kerajaan dalam mempertahankan kekuasaan dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, memusnakan semua lawan-lawan politik termasuk keluarganya. Tidak boleh ada yang tersisa dari keluarga penguasa lama sebab hal itu karena akan menimbulkan benih-benih ancaman terhadap pemimpin yang sedang berkuasa. *Kedua*, dengan melakukan kolonisasi mendirikan pemukiman baru dan menempatkan hubungan baik dengan kerajaan di wilayah koloni serta melakukan hubungan baik dengan raja-raja tetangga [Suhelmi, 2001;133].

Di era kontemporer untuk mempertahankan kekuasaan tidak lagi mengedepankan aksi-aksi kekerasan. Suksesi kepemimpinan politik dilakukan dengan cara pemilihan. Logika yang dijadikan konsensus bersama adalah pemenangnya berdasarkan suara terbanyak. Untuk mendapatkan suara terbanyak perempuan harus mendekati masyarakat, apa pun caranya. Sebab, wajar dan memang manusiawi, dominannya motivasi untuk menang di kalangan kontestan dalam pemilihan. Karena kemenangan bukan saja kepuasan batin, tetapi juga membuka berbagai macam kemungkinan [Swantoro, 2007;381]. Salah satu kemungkinan yang bisa diperoleh adalah materi. Kekuasaan politik bisa menghasilkan kekayaan berlipat ganda. Ini soal

Ahmad Imron Rozuli, Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi kecerdasan pemimpin politik dalam memanfaatkan jabatannya [Haboddin, 2017;134]. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri dan keluarga merupakan bentuk korupsi. Karena untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan keuntungan dari jabatan yang diembannya [Haboddin, dan Rahman, 2013;7].

PEREMPUAN DAN KORUPSI

Perempuan koruptor merupakan bahasa vulgar dan mengandung kekerasan simbolik. Bagi aktivis perempuan tentu akan sangat marah. Tetapi, fakta berbicara sesungguhnya. Sejak ruang demokrasi dibuka dan partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat. Data pemilu tahun 1955 sampai 2009 menunjuk jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR mengalami peningkatan. Hal ini bisa disimak pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Anggota DPR Perempuan 1955-2009

Tahun pemilu	Perempuan	Persentase	Total DPR
1955	16	5,88	272
1971	31	6,38	460
1977	37	8,04	460
1982	42	9,13	460
1987	59	11,8	500
1992	62	12,4	500
1997	58	11,6	500
1999	44	8,8	500
2004	65	11,82	550
2009	100	17,59	560

Diolah: BPS RI, 2010

Data di atas memberikan petunjuk bahwa eksistensi perempuan dalam parlemen meningkat. Bila pemilu pertama, 1955 jumlah perempuan yang menjadi DPR 16 dari total 272 orang, maka pemilu 1992 berhasil menaikkan jumlah perempuan di DPR sebanyak 62 dari total 500 orang. Sedangkan pada pemilu 2009 jumlah perempuan sebanyak 100 dari 560 anggota DPR. Dari jumlah tentu sangat membanggakan. Selain itu, perempuan juga berhasil menaikkan statusnya disejumlah negara dengan terpilih sebagai Presiden dan Perdana Menteri. Di Indonesia pernah dipimpin oleh Megawati. Di Selandia Baru, Jacinda Ardern memberikan inspirasi kepada rakyat atas

keberhasilannya menduduki jabatan politik sebagai Perdana Menteri [*Kompas*, 21 Januari 2018]. Di Singapura presidennya dari etnis Melayu, yakni Halimah Yocob.

Kehadiran perempuan dalam institusi politik patut mendapat apresiasi. Media massa di tanah air ramai memberitakan perempuan pejabat publik pada umumnya, dan gerakan politik pada khususnya. Perempuan bangkit dalam arus emansipasi politik. Sebagaimana ditulis, Djohan Effendi [2012;358] dalam puisi yang bertajuk:

EMANSIPASI

*suatu zaman perempuan dilecehkan
sekedar objek laki-laki
bukan subjek mandiri
bukan manusia penuh
zaman baru datang
perempuan muncul ke depan pegang peranan*

.....

*Berteriak lantang
Menuntut emansipasi
Tak ada lagi diskriminasi*

Kebangkitan perempuan dalam kekuasaan tidak seindah di bayangkan. Dalam politik, perempuan tidak menampilkan diri dengan karakter sabar, menjunjung tinggi nilai kejujuran, tahan dengan materi, dan tahan cobaan [*Kompas*, 21 April 2003]. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan *miring* media massa terhadap pemimpin perempuan. Sejumlah politisi Senayan terlibat dalam kasus korupsi. Anggota DPRD dari Partai Hanura, Demokrat, PDIP, Golkar, dan PAN dinyatakan terlibat korupsi dan sekarang sedang berada dalam penjara. Untuk menguatkan penjelasan, simak tabel 1.2

Tabel 1.2 Anggota DPR Perempuan Korupsi

Nama	Partai politik	Jabatan
Dewi Yasin Limpo	Hanura	DPR
Angelina Sondak	Demokrat	DPR
Damayanti Wisnu Putranti	PDIP	DPR
Waode nurhayati	PAN	DPR
Chaerun Nisa	Golkar	DPR
Miryam S Haryani	Hanura	DPR

Diolah dari Banyak Sumber

Keterlibatan perempuan dalam pusaran korupsi menunjukkan bahwa praktik korupsi semakin menggurita dan menjalar begitu rupa. Implikasinya adalah citra DPR

Ahmad Imron Rozuli, Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi semakin rusak dimata publik. *Jajak Pendapat Kompas* pada bulan Agustus 2016 menyebutkan hal itu. Dalam Jajak Pendapat ditanyakan setuju atau tidak Anda dengan pernyataan terkait dengan anggota DPR berikut ini. Lihat tabel 1.3.

Tabel 1.3 setuju dan tidak setuju Anda dalam pernyataan

Setuju dan tidak setuju Anda dalam pernyataan	Persen		
	Setuju	Tidak	Tidak tahu
Lebih mengutamakan kepentingan pribadi/partai daripada kepentingan bangsa	62,8	33,4	3,8
Pasif/diam/tidak pernah memberikan pendapat dalam sidang	59	36,2	4,8
Berperilaku kasar atau temperamental	59	34,8	5,8
Jarang turun ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan para konstituen	60,6	34,3	5,1
Suka menunjukkan gaya hidup mewah secara terbuka	58,5	34,7	6,8
Suka melanggar hukum	56,5	37,1	6,4

Kompas, 29 Agustus 2016

Data menunjukkan bahwa 62,8 persen jawaban respon mengatakan bahwa anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan pribadi/partai daripada kepentingan bangsa. Ironis lagi, adalah DPR yang dipilih secara langsung rakyat tetapi jarang turun menemui kontituennya. Anggota DPR menjadi mahluk etis. Ketika DPR sudah terpilih, mereka dengan mudah mengatasnamakan rakyat dan kepentingan rakyat [Ulfah, Haboddin, dan Setiawan, 2017;5]. Padahal ketika sidang anggota DPR lebih banyak diam dan pasif.

Pada level daerah perempuan juga menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Sejumlah kepala daerah hasil pemilihan langsung berhasil dipenjarakan oleh KPK karena menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Misalnya, Walikota Tegal, Bupati Kutai Kertanegara, Bupati Minahasa, Gubernur Banten, Walikota Cimahi, dan Bupati Klaten. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Perempuan Kepala Daerah Korupsi

Nama	Jabatan
Siti Masitha Soeparno	Wali kota Tegal
Rita Widayarsi	Bupati Kutai Kartegara
Vonnie Anneke Panambunan	Bupati Minahasa
Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten
Atty Suharti	Walikota Cimahi
Sri Hartini	Bupati Klaten

Diolah dari Banyak Sumber

Kepala daerah korupsi benar-benar menjalar. Ada empat kepala daerah korupsi di pulau Jawa, satu di Kalimantan dan Sulawesi. Dengan demikian, praktik korupsi sudah menjalar di hampir semua penyelenggara negara. Bukan saja terjadi di tingkat pusat, melainkan juga merata ke seluruh daerah. Bahkan, sampai ke pelosok desa [Osa, 2016]. Hal ini membenarkan Suseno [1992;115] bahwa:

Orang perpolitik demi pamri pribadi saja. Perempuan yang menjadi politisi dianggap hanya mau memperkaya diri, yang dengan sendirinya akan menyalahgunakan kedudukannya dalam struktur politik dan pemerintahan demi kepentingan pribadi. Politik dianggap sebagai bisnis untuk menjadi kaya bersama keluarga. Integritas politisi perempuan hilang.

Analisis Suseno sulit untuk dibantah. Berprofesi sebagai politisi semata-mata untuk memperkaya diri. Integritas perempuan dipertaruhkan. Peran perempuan protagonis dan jatuh ketika sedang berada dalam kekuasaan. Kekuasaan memang mempersona sekaligus memabukkan. Karena itu, kesadaran tentang peran dan hak perempuan pada hubungan kekuasaan sejatinya ditonjolkan. Bukankah sejumlah perempuan yang berposisi sebagai pemimpin negara, seperti Margaret Thatcher dari Inggris, Goldan Meir dari Israel ataupun Indira Gandhi dari India, dan Benazir Butto dari Pakistan, ternyata sanggup membawa negaranya sejajar dengan negara-negara lain [Sudirman, 2003].

PERILAKU HEDONISME

Hedonisme berasal dari bahasa Yunani (*hedene*: nikmat, kegembiraan). Hedonisme berpijak pada anggapan bahwa manusia hendaknya hidup sedemikian rupa, sehingga ia dapat semakin bahagia. Ada juga pandangan yang mengatakan tercapainya

kebahagiaan mesti menjadi tujuan kehidupan manusia [Suseno, 1989;113]. Hidup untuk mencari kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan bisa diperoleh dengan cara berkuasa. Suami korupsi, siapakah yang sebenarnya menikmati? Uang dan barang hasil perbuatan korupsi yang dilakukan pria ternyata lebih banyak diperuntukkan bagi istri. Sebaliknya, jika istri korupsi siapa yang paling banyak menikmati?

Politisi perempuan yang terlibat dalam perilaku korupsi disebabkan karena dua faktor. *Pertama*, gaya hidup glamor. Lihatlah kehidupan Angelina Sondakh yang dikenal boros dan bergaya hidup mewah dan kegemarannya belanja *on-line* [sidomi.com. diakses, 22/1/2018]. Ratu Atut juga sangat gemar mengenakan barang-barang mewah. Bila pelisiran ke luar negeri, ia mampir ke gerai dan berbelanja, hingga ratusan juta rupiah. Bila semua barang-barang itu dipakai nilai mencapai 1 miliar [Tempo.co.id, diakses, 22/1/2018]. Gaya hidup mewah yang diperankan Angelina dan Atut berbanding terbalik dengan gajinya sebagai pejabat negara. Karena itu, Syed Husseini Alatas [1983'9] mengatakan nafsu untuk hidup mewah bagi pejabat negara. Untuk memenuhi belanja kementerian itulah para politisi perempuan terjerumus dengan urusan korupsi.

Kedua, keserakahan dalam mengoperasionalkan kekuasaan. Nafsu untuk mengumpulkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara dilakukan secara sadar dan rasional. Berkuasa berarti kesempatan memperkaya diri. Akibatnya adalah politisi perempuan memiliki rekening obesitas. Rekening obesitas adalah rekening yang terlalu banyak sumber pemasukan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Dalam bahasa agama disebut rekening gendut tidak dapat dijamin tingkat kehalalannya. Dalam istilah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening yang mengandung transaksi mencurigakan [Indrayana, 2011;277].

Pendapat lain mengatakan perempuan menjadi pelaku korupsi karena berada di dalam pusaran lingkungan yang tidak demokratis dan tidak mengindahkan *rule of law*. Lingkungan korup [Stefanus Osa] membuat perempuan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Menyalahkan lingkungan tentu ada benarnya. Tetapi, lebih bijak bila dikatakan bahwa sangat tergantung dengan politisi perempuan itu sendiri.

PEREMPUAN TANGGUH

Keterlibatan perempuan dalam perilaku korupsi perlu dicarikan solusinya. Berkarir dalam politik dan menjadi pejabat negara merupakan hak azasi manusia. Karena

itu, perempuan yang berkarir perlu tahan godaan korupsi ketika sedang berada dalam lingkaran pemerintahan. Menjadi perempuan tangguh, bertanggungjawab, hidup sederhana, dan berintegritas merupakan pilihan tepat dalam praktik politik yang kasar, predator, dan kotor.

Karena itu, dalam membangun politisi perempuan tangguh ada tiga hal yang perlu dilakukan secara serentak. *Pertama*, politisi perempuan harus memiliki integritas sebagai pemimpin. Integritas seorang politisi perempuan terangkum dalam puisi berjudul:

INTEGRASI

*Dalam integritas pribadi
Terletak nilai tertinggi
Martabat manusia
Menjelma dalam
Satu kata dan perbuatan
Manusia dipegang dari ucapannya
Dan teruji dalam perbuatannya
Solidaritas warga sumber kekuatan
Untuk membentuk masyarakat yang utuh
Bagaikan bangunan yang kukuh
Dan tangguh
Tiada dusta
Saling percaya
Antarsesama warga [Effendi,2012;133].*

Kedua, politisi perempuan memiliki moralitas negarawan. Moralitas negarawan kelihatan dalam keterlibatannya dalam semua proses politik, dan kemampuannya untuk mengembangkan wawasan dan cita-citanya sesuai dengan meluasnya jangkauan tanggungjawab [Suseno, 1989;133]. Politisi perempuan memiliki tanggungjawab untuk membebaskan bangsa ini dari perilaku korup. Sebagai seorang ibu, tentu kita merindukan sosok perempuan tangguh bisa digambarkan sebagai Drupati karena kekuatan, keberanian, daya tahan, kemampuan untuk memusnakan bila diperlukan, dan untuk mendatangkan kemenangan hidup yang senantiasa membawa harapan dan imam bagi generasi mendatang [Sharma,2013;89].

Ketiga, politisi perempuan harus mengimplementasikan pertanggungjawab politik kepada pemilih/konstituennya. Mereka bisa terpilih sebagai kepala daerah

Ahmad Imron Rozuli, Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi ataupun legislatif karena masyarakat secara sukarela memilih mereka sebagai pemimpin. Karena itu, politisi perempuan tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan akibat-akibat tindakannya terhadap semua masyarakat yang kena tindakannya [Suseno, 1989;129]. Pertanggungjawab politik semacam ini perlu di lembagakan dalam sistem politik kita.

Keempat, politisi perempuan harus menjadi aktor terdepan dalam menyerukan sikap anti-partai politik, anti-parlemen, dan anti pemerintah apabila ada kader atau pejabat publik yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, politisi perempuan juga bisa mengajak rakyat untuk tetap kritis terhadap partai politik dan pemerintah. Sebab sampai saat ini pemerintah dan partai politik selalu bersikap terus-terusan memperlak rakyat [Rendra, 2001;95].

Jadi, perempuan harus tangguh dalam menjalankan peran sebagai pejabat publik. Dengan bersandar pada integritas, memiliki moral kenegarawan, memiliki tanggungjawab, dan mengajak masyarakat kritis akan mampu merubah wajah politik lebih humanis dan bermartabat. Selain itu, politisi perempuan juga perlu mendorong untuk membentuk pemerintahan yang bersih, dan menggalang kekuatan nasional menjadi satu keseragaman, agar bisa lebih militan dan efisien menjalankan pembangunan demokrasi dengan memerangi kebobrokan [2010;47], korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PEREMPUAN MELANGKAH KE DEPAN.

Keterlibatan perempuan dalam korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan bisa memberikan pelajaran. Mengambil pelajaran berharga dari peristiwa korupsi sangat penting artinya. Keterlibatan politisi perempuan dalam korupsi merupakan bukti kegagalan seseorang tampil sebagai pemimpin. Karena itu berbahagialah pemimpin-pemimpin secara diri berusaha melihat petanda-petanda zaman, sehingga mereka tidak perlu dirundung rasa kecewa [Swantoro,2007;213-214] dalam meniti politik yang lebih baik dan demokratis.

Di tengah situasi yang serba berubah. Langkah politik perempuan perlu ditata- ulang dengan mengikuti ritme waktu dan perubahan politik yang sedang terjadi. Sejarah berulang. Hanya konteks ruang, waktu, dan jalinan peristiwa serta para pelakunya yang

berbeda. Karena itu, perlu diresapi puisi indah yang ditulis Djohan Effendi [2012;147] berjudul *waktu*,

*hidup adalah perjalanan menuju kesempurnaan
perubahan adalah keniscayaan untuk meraih kemajuan
waktu tak pernah berhenti
hari kemarin berlalu dan tak pernah kembali
hari ini singgah sekejap lalu pergi dan lenyap*

....

*Masih ada hari esok. Sosong dengan tekad dan keringat
Diam berarti kemunduran. Bergeraklah, berubahlah
Lakukan perubahan dengan tangan sendiri
Jangan harap tangan orang lain. Juga tangan Tuhan
Dia tidak akan mengubah kalau kita diam tak mau berubah
Jadilah mitra Tuhan yang aktif, penuh gairah
Menggerakkan perubahan
Menciptakan kemajuan
Membentuk masa depan*

Perempuan adalah aktor yang bisa menggerak perubahan dalam struktur politik pemerintahan yang nir-korupsi. Perempuan adalah pembentuk masa depan dengan menciptakan generasi tangguh dan anti-korupsi. Inilah peran hakiki perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, Angger Wiji. 2012. 'Mitos, Data, dan Fakta Perempuan Pemimpin' Jurnal Perempuan, Vol 17, No 4 Desember
- Reid, Anthony. 2011. *Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450-1680* Jakarta, YOI.
- Sharma, Kavita A. 2013. *Perempuan-Perempuan Mahabrata* Jakarta, KPG.
- Kumar, Aan. 2008. *Prajurit Perempuan Jawa* Jakarta, Komunitas Bambu.
- Permanadeli, Risa. 2016. 'Cermin Retak itu Bernama Perempuan' *Kompas*, 18 Juni.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia
- Swantoro, P.2007. *Masalah Selalu Aktual*. Jakarta, Kompas.
- Haboddin, Muhtar.2017. *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang: UB Press
- Haboddin, Muhtar dan Fathur Rahman, 2013. *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, Jogjakarta: Kaukaba.
- Kompas*, 21 Januari 2018
- Effendi, Djohan . 2012. *Pesan-pesan Al-Quran*, Jakarta, Serambi.
- Kompas*, 21 April 2003.
- Ulfah, Irma Fitriani, Muhtar Haboddin, dan Andi Setiawan, 2017. *Kajian Tentang Parlemen* Malang: UB Press
- Osa, Stefanus. 2016 'Perempuan dalam Pusaran Korupsi' *Kompas*, 29 Agustus
- Suseno, Franz Magnis, 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik*, Jakarta: Gramedia
- HN, Sudirman. '2003. Apakah Perang Hanya ada dalam Kepala Laki-Laki?' *Kompas*, 21 April.
- Suseno, Franz Magnis, 1989. *Etika Dasar*. Jogjakarta: Kanisus
- Indrayana, Denny. 2011. *Cerita Di Balik Berita*. Jakarta, BIP.
- Rendra, 2001. *Megatruh* Jogjakarta, Kepel